

MENINGKATKAN KINERJA ANGGARAN BERKONSEP *VALUE FOR MONEY*

Melinda Dwi Puspitasari¹, Dekeng Setyo Budiarto²

^{1,2}Program Sarjana Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta

Corresponding author: dekengsb@upy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan partisipasi terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* dalam organisasi pemerintah (OPD) Kabupaten Bantul. Populasi penelitian ini adalah bendahara atau staf keuangan OPD Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 90 responden dengan metode purposive sampling. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Data dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan partisipasi mempengaruhi kinerja anggaran dengan konsep *value for money*.

Kata Kunci: akuntabilitas; transparansi; pengawasan; partisipasi; *value for money*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of accountability, transparency, supervision, and participation on-budget performance with the concept of value for money in government organizations (OPD) of the Bantul Regency. This study used 90 financial staff as a sample with a purposive sampling method. This research is a quantitative study with data collection through questionnaires. Data were analyzed by multiple linear regression. This study proves that accountability, transparency, supervision, and participation affect budget performance with the concept of value for money.

Keywords: *accountability; transparency; supervision; participation; value for money*

1. PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari kepercayaan masyarakat, sehingga proses penyelenggaraannya harus diimbangi dengan pemerintahan yang bersih dan transparan (Putra, 2018). Hal tersebut berkaitan dengan adanya kepedulian masyarakat yang semakin besar terhadap proses jalannya pemerintahan (Laoli, 2019). Salah satunya adalah tuntutan

masyarakat dalam hal pengelolaan anggaran yang harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Cara tersebut dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan cara menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja agar hasilnya maksimal dengan penggunaan dana seminimal mungkin. Upaya tersebut merupakan cara pemerintah dimasa otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Selain menerapkan anggaran berbasis kinerja, untuk mewujudkan *good governance* pemerintah harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran (Nababan et al., 2018; Purnomo & Putri, 2018). Penerapan *good governance* pada pemerintah daerah ditujukan agar proses penyelenggaraan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan secara efisien dan efektif, tanggung jawab, serta bebas dari tindakan yang menyimpang (Iswahyudi et al., 2016).

Disamping itu terdapat Permandagri No. 21 Tahun 2011, dimana didalam peraturan tersebut tertulis bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya harus menggunakan prinsip akuntabel dan transparan. Pelaksanaan sistem akuntabilitas yang dilakukan oleh sektor pemerintahan jika tidak berjalan baik berarti terdapat kecenderungan kecurangan maupun penyelewengan anggaran (Basri & Nabiha, 2014). Penerapan akuntabilitas dalam sektor publik tidak hanya dimaksudkan untuk mendeteksi maupun mencegah hal-hal yang menyimpang, akan tetapi digunakan dalam hal peningkatan kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah daerah dalam proses pengelolaan anggaran juga tidak terlepas dari proses pengawasan (Aprianti & Riharjo, 2017). Bagi pemerintah daerah pengawasan sangat diperlukan, karena pada dasarnya pengawasan digunakan untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi maupun pemerintah daerah dalam pencapaian keberhasilan. Pengawasan dapat dimulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan (Purnama & Nadirsyah, 2016). Selain itu dalam menciptakan akuntabilitas publik juga diperlukan adanya partisipasi dari warga masyarakat maupun instansi pemerintah dalam penyusunan dan pengawasan anggaran demi terciptanya proses pengelolaan anggaran yang baik (Putra et al., 2017).

Proses pengelolaan anggaran seharusnya dilakukan dengan prinsip *value for money* atau anggaran berbasis kinerja, karena digunakan sebagai acuan maupun dasar untuk memperbaiki anggaran sektor publik (Pertiwi, 2015; Setiyanningrum & Isroah, 2017). Terdapat tiga indikator utama dalam penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu ekonomi,

efisien dan efektif (Mardiasmo, 2018). Elda et al. (2020) mengatakan bahwa implementasi prinsip tersebut dapat mewujudkan pemerintah daerah menjadi suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain *good governance*, menurut Nababan et al. (2018) dan Ningsih (2017) alasan pemerintah daerah masih perlu mengimplementasikan *value for money* yaitu banyaknya anggaran yang boros, *output* yang dihasilkan tidak sebanding dengan banyaknya anggaran yang dikeluarkan.

Penelitian ini masih menarik untuk diteliti karena masih banyaknya kasus inefisiensi, kebocoran dana maupun pemborosan yang terjadi dalam penggunaan anggaran pada sektor pemerintahan. Seperti yang dimuat dalam kementerian pendayagunaan (Kemanpan RB) bahwa didalam aktivitas yang berkaitan dengan program pada pemerintah pusat maupun daerah ditemukan adanya penyimpangan terhadap aktivitas pengelolaan anggaran, penyimpangan tersebut berupa inefisiensi atau pemborosan dana. Pemborosan sudah terjadi sejak tahun 2015, dan didapati inefisiensi anggaran 8,92 triliun. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2015-2016 menunjukkan angka inefisiensi anggaran sejumlah 392,87 triliun. Tahun 2017-2018 masih terjadi inefisiensi anggaran. Akan tetapi pada kedua tahun tersebut terjadi penghematan anggaran yang totalnya mencapai 110 triliun. Tahun 2019 terjadi potensi inefisiensi anggaran yang dapat dicegah sebesar 5,7 triliun. Penurunan angka tersebut diakibatkan oleh upaya *refocusing* program pembangunan oleh sejumlah instansi pemerintah sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Dalam hal ini Kemanpan RB akan bekerja sama dengan Bappenas untuk mengatur *outcome* dari setiap program kementerian/lembaga dan pemerintah yang nantinya semua kegiatan yang tidak penting akan dihilangkan.

Motivasi penelitian ini adalah adanya hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten. Hasil dari penelitian (Firmansyah et al., 2018; Ningsih, 2017; Pertiwi, 2015; Purnomo & Putri, 2018; Sayuti et al., 2018; Setiyanningrum & Isroah, 2017) mengatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan partisipasi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Berbeda dengan penelitian (Afriani et al., 2018; Asrida, 2012; Laoli, 2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Motivasi lain dalam penelitian ini karena masih ditemukan adanya penyimpangan pengelolaan anggaran khususnya dalam organisasi sektor publik (Ningsih, 2017; Setia et al., 2019). Hal

tersebut tentunya dapat menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan dimata publik atau rakyat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas dan Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*

Menurut Putri & Subardjo (2017) akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan pemberian informasi maupun pengungkapan atas aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Tandililing (2019) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas penyelenggaraan kinerjanya kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas merupakan salah satu implementasi dari prinsip *value for money* untuk mengantar pada pemerintahan yang baik (*good governance*) (Afriani et al., 2018; Ningsih, 2017). Akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan penyelenggaraan pemerintah yang baik selain itu juga mencegah timbulnya kesempatan dalam melakukan tindakan yang menyimpang (Turalaki et al., 2013). Oleh karena itu, untuk mewujudkan hasil kinerja yang ekonomis, efektif dan efisien dapat didorong dengan adanya akuntabilitas (Laoli, 2019). Hal ini didukung oleh penelitian Firmansyah et al. (2018) bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*

2.2 Transparansi dan Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*

Transparansi merupakan keterbukaan dalam mengakses maupun memperoleh informasi, adanya laporan pengelolaan anggaran yang diungkapkan secara periodik serta untuk memberitahukan kepada publik atas jalannya proses pemerintahan (Putri & Subardjo, 2017). Salah satu aspek dasar transparansi adalah adanya keterbukaan dalam mengakses maupun memperoleh informasi (Rigian & Sari, 2019). Transparansi harus dilakukan oleh pemerintah karena menjalankan amanat dari rakyat. Suartini et al. (2020) mengungkapkan transparansi menjadi instrumen penting karena dengan adanya transparansi tindakan yang menyimpang akan sulit disembunyikan. Hal ini dukung oleh penelitian yang dilakukan Setia et al. (2019) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran

berkonsep *value for money*. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*

2.3 Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*

Pengawasan merupakan suatu aktivitas yang ditujukan terhadap semua aktivitas pemerintahan melalui pemeriksaan secara menyeluruh dimaksudkan agar seluruh aktivitas yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Setiyaningrum & Isroah, 2017). Pengawasan merupakan bagian penting terhadap jalannya pemerintahan atas aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan karena pengelolaan keuangan berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, pelaksanaan program sampai dengan tahap pelaporan. Apabila dalam proses pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan kegiatan ditemukan adanya penyimpangan maka penyimpangan tersebut akan segera dikoreksi maupun ditindaklanjuti (Aprianti & Riharjo, 2017). Dengan adanya koreksi, maka proses pengelolaan keuangan diharapkan masih dapat berjalan secara maksimal (Afriani et al., 2018). Menurut Rigian & Sari (2019) proses pengawasan diperlukan dalam kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintah agar dapat berjalan secara maksimal, serta mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Elda et al.(2020) yang menyimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*

2.4 Partisipasi dan Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*

Partisipasi merupakan keterlibatan dua orang atau lebih dalam proses pengambilan keputusan yang nantinya akan memberikan pengaruh bagi orang yang mengerjakannya (Ridha, 2017). Dalam mencapai kinerja anggaran yang baik dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi anggaran perlu adanya partisipasi (Safitri & Mildawati, 2019). Kinerja pemerintah daerah sangat erat hubungannya dengan partisipasi anggaran karena kinerja aparat pemerintah yang baik dapat dilihat dari seberapa besar keterlibatannya dalam proses penyusunan anggaran selain itu aparat pemerintah daerah juga diberikan kesempatan dalam proses pengambilan keputusan (Triseptya et al., 2017). Dengan demikian, partisipasi memberikan dampak positif bagi pemerintah karena suatu tujuan akan lebih dapat diterima

jika seluruh aparat pemerintah berperan dalam menentukan prosedur maupun strategi demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan (Basyir, 2016). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Rigian & Sari (2019) yang menyimpulkan bahwa partisipasi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Partisipasi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul yang meliputi Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria: (a) pegawai atau pejabat bagian keuangan yang terdiri dari bendahara atau staf bagian keuangan; (b) pegawai dengan masa kerja minimal satu tahun dan tidak sedang dipindahkan dari instansi lain dan (c) jenjang pendidikan minimal SMA. Pengumpulan data melalui kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden pada 18 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang memperoleh sebanyak 90 kuesioner.

Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja anggaran berkonsep *value for money* dengan indikator 1) menghindari pengeluaran yang boros/boros; 2) cermat dalam pengadaan sumber daya; 3) penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu; 4) menurunkan biaya kinerja pelayanan publik dan 5) tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau pelayanan yang tepat sasaran. Instrumen yang digunakan adalah instrumen yang diambil dari penelitian sebelumnya, yaitu (Adiwirya & Sudana, 2015; Purnomo & Putri, 2018).

Variabel independen yang digunakan adalah akuntabilitas yang diukur dari penelitian yang dikembangkan oleh Purnomo & Putri (2018) dengan menggunakan indikator 1) penghindaran penyalahgunaan jabatan; 2) kepatuhan terhadap hukum; 3) proses dan pertanggungjawaban anggaran; 4) pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya; 5) pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal dan 6) pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat.

Variabel transparansi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Sopanah (2003) dalam Purnomo & Putri (2018) yaitu 1) sistem keterbukaan kebijakan anggaran; 2) dokumen anggaran mudah diakses; 3) laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; 4) memperbaiki usulan atau suara dari rakyat dan 5) sistem pemberian informasi kepada publik.

Variabel pengawasan diukur menggunakan indikator yang diambil dari Gaspersz (1998) dalam penelitian yang dikembangkan oleh Purnomo & Putri (2018), dengan menggunakan indikator 1) *input* (masukan) pengawasan; 2) proses pengawasan dan 3) *ouput* (keluaran) pengawasan. Sedangkan variabel partisipasi diukur menggunakan indikator 1) keikutsertaan dalam penyusunan anggaran; 2) kebutuhan memberikan pendapat; 3) kerelaan dalam memberikan pendapat; 4) besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran hingga akhir dan 5) seringnya atasan meminta pendapat atau usulan, yang diambil dari penelitian sebelumnya yaitu Milani 1975 dalam (Pratikyo & Suprpti, 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan pengumpulan data selama 2 bulan dengan menggunakan kuesioner baik online maupun offline. Berdasarkan hasil analisis terhadap diskripsi responden ditunjukkan pada Tabel 1. Setelah dilakukan analisis terhadap diskripsi responden selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Contoh hasil uji validitas untuk variabel partisipasi ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 1. Karakteristik Responden

	Keterangan	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki-laki	46
	Perempuan	44
Usia	20-30 tahun	12
	31-40 tahun	27
	41-50 Ahun	30
	> 50 tahun	21
Pendidikan Terakhir	SLTA/SMA	17
	D3	11
	S1	49
	S2	13
	S3	0
Lama Bekerja	< 5 tahun	15
	5-10 tahun	15
	> 10 tahun	60
Jumlah Sampel		90

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi

Butir	Korelasi	Sig (2-Tailed)	Keterangan
X4.1	0,836**	0,000	Valid
X4.2	0,672**	0,000	Valid
X4.3	0,817**	0,000	Valid
X4.4	0,833**	0,000	Valid
X4.5	0,716**	0,000	Valid

Ket: ** sig < 1%

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas	X1 - X18	0,937	Reliabel
Transparansi	X19- X29	0,921	Reliabel
Pengawasan	X30- X39	0,911	Reliabel
Partisipasi	X40- X44	0,834	Reliabel
Kinerja Anggaran	Y1 - Y14	0,911	Reliabel

Sumber: data primer diolah tahun 2020

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	t	P value.	Keterangan
Akuntabilitas	0,311	4,275	0,000**	H ₁ : diterima
Transparansi	0,275	2,523	0,014*	H ₂ : diterima
Pengawasan	0,245	2,306	0,024*	H ₃ : diterima
Partisipasi	0,262	2,220	0,029*	H ₄ : diterima
F hitung = 77,312			0,000**	
Adjusted R, Square = 0,774				

Ket: ** sig < 1%, * sig < 5%

Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Premananda & Latrini (2017) dan Fernandes (2015) yang mengatakan bahwa dengan penerapan akuntabilitas yang kuat pada pemerintah daerah maka akan menghasilkan capaian kinerja anggaran yang baik, karena terdapat tanggung jawab yang besar terhadap proses jalannya anggaran serta dapat menciptakan pelaporan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Akuntabilitas yang tinggi pada seorang karyawan pada sebuah organisasi maupun pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi sebuah organisasi karena tingginya rasa tanggungjawab yang dimiliki karyawan akan membangkitkan semangat untuk bekerja lebih giat yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas mengandung empat unsur yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan, ke-empat unsur tersebut harus dilakukan secara berkala dan tepat waktu dalam penyelenggaraan pemerintah (Batubara & Risna, 2020; Setia et al., 2019).

Pemerintah daerah dituntut menerapkan akuntabilitas dalam kewenangannya untuk mengelola sumber daya berupa kinerja maupun pengelolaan keuangan secara mandiri yang digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan.

Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Safitri & Mildawati (2019) dan Setia et al. (2019) yang menyatakan bahwa transparansi pada pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah. Keterbukaan informasi pemerintah kepada publik akan meningkatkan transparansi sehingga penyimpangan akan sulit untuk disembunyikan. Informasi yang dihasilkan atas aktivitas penyelenggaraan pemerintah harus diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk penyampaian hak atas transparansi yang dilakukan (Nababan et al., 2018). Secara teoritis terdapat dua aspek transparansi yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah wajib membenahi dengan baik kinerja anggaran yang telah dilakukan dengan memperhatikan dua aspek transparansi tersebut. Transparansi yang dilakukan pemerintah daerah tidak boleh berat sebelah, yang berarti hanya terfokus pada salah satu pihak secara tidak proporsional (Auditya et al., 2013). Transparansi tidak hanya berkaitan dengan informasi akan tetapi transparansi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak (Aprianti & Riharjo, 2017). Menurut Suartini et al. (2020) dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah harus menerapkan azas transparansi agar aparat pemerintah dapat berkerja secara maksimal serta berusaha memberikan hasil kinerja yang baik pada masyarakat.

Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Rigian & Sari (2019) tetapi sejalan dengan penelitian Elda et al. (2020) dan Putri & Subardjo (2017) yang menyatakan bahwa tindakan penyimpangan dapat dicegah dengan adanya pengawasan, sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan, program dan tugasnya yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan juga meliputi pembinaan terhadap pegawai agar dapat bekerja sesuai dengan program dan ketentuan. Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam bentuk pemantauan untuk menjamin bahwa aktivitas tersebut dilakukan tanpa adanya tindakan yang

menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran sehingga menyebabkan terhambatnya proses pencapaian suatu tujuan (Pertwi, 2015).

Partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Safitri & Mildawati (2019) yang menyimpulkan partisipasi anggaran merupakan cara yang digunakan untuk membentuk sistem pengendalian pada suatu organisasi sehingga tujuan yang dihasilkan dari sebuah organisasi akan berjalan baik dan maksimal. Instrumen dasar partisipasi adalah adanya hak atau kebebasan untuk memberikan usulan dalam mekanisme pengambilan keputusan (Batubara & Risna, 2020). Partisipasi memberikan kesempatan bagi aparat pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang berkaitan dengan anggaran. Partisipasi dalam pengelolaan maupun penyusunan anggaran merupakan pendekatan untuk meningkatkan kinerja yang akan mendorong efektivitas organisasi (Rahayu et al., 2014).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan partisipasi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada OPD Kabupaten Bantul sudah terbukti baik dengan hasil yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan partisipasi terhadap kinerja anggaran.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini masih sangat terbatas karena hanya mengambil sampel pada OPD Kabupaten Bantul, bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas atau menambahkan OPD yang belum diuji seperti kantor kecamatan di kabupaten/kota. Penelitian ini hanya menggunakan variabel akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan partisipasi dengan metode pengambilan sampel menggunakan kuesioner dan tidak menggunakan pertanyaan lisan maupun wawancara langsung kepada responden, pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain dan menggunakan metode wawancara atau melakukan observasi, supaya data yang diperoleh lebih relevan dan akurat (Safitri & Mildawati, 2019; Setia et al., 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, M. F., & Sudana, I. P. (2015). Akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2), 611–628.
- Afriani, C., Salle, A., & Rande, A. (2018). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis value for money (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 68–82.
- Aprianti, E. R., & Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pada instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 6(12), 1–17. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Asrida, A. (2012). Pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap kinerja penyusunan anggaran pada pemerintah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*, 1(1)(1), 29–40.
- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–41.
- Basri, H., & Nabiha, A. K. S. (2014). Accountability of local government: The case of Aceh Province, Indonesia. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance*, 3(1), 1–14.
- Basyir, A. A. (2016). Pengaruh partisipasi anggaran, informasi asimetri, dan kapasitas individu terhadap budgetary slack pada SKPD pemerintah kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi & Keuangan*, 13(2), 82–102.
- Batubara, Z., & Risna, R. (2020). Pengaruh akuntabilitas, partisipasi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 95–109. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886>
- Elda, N., Sulisty, & Dianawati, E. (2020). Pengaruh pengawasan keuangan dan penyajian laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah berkonsep value for money pada pemerintah kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8.
- Fernandes, W. (2015). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran pada pemerintah daerah kabupaten Kampar. *Jom FEKON*, 2(2), 1–13.

- Firmansyah, Sapiri, M., & Setiawan, L. (2018). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di kota Makassar. *Economics Bosowa Journal*, 4(1), 165–177.
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2016). Hubungan pemahaman akuntabilitas, transparansi, partisipasi, value for money dan good governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151–166.
- Laoli, V. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran berkonsep value of money pada pemerintah kabupaten Nias. *Owner*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.108>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi I). Andi Yogyakarta.
- Nababan, R. A., Sihombing, M., & Thamrin, H. (2018). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi, terhadap pengelolaan keuangan berkonsep value for money pada pemerintah di kabupaten Dairi. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 108. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10157>
- Ningsih, N. H. (2017). Pengaruh pengetahuan tentang akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep value for money dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) di SKPD kota Palembang. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1170>
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, (2011).
- Pertiwi, D. P. (2015). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Pratikyo, A. N. D., & Suprpti, S. (2016). Pengaruh partisipasi anggaran, teknologi informasi, dan kaulitas informasi manajemen terhadap kinerja manajerial (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Kabupaten Pati). *Serat Acitya*, 5(1), 84–99.
- Premananda, N. L. P. U., & Latrini, N. M. Y. (2017). Pengaruh akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran pada pemerintah kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2451–2476.
- Purnama, F., & Nadirsyah, N. (2016). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas,

- dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1–15.
- Purnomo, B. S., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan kinerja anggaran berkonsep value for money. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(3), 467–480. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886>
- Putra, F., Darwanis, & Saputra, M. (2017). Pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengetahuan anggota dewan terhadap pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah (Studi Empiris di Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 10(1), 47–56.
- Putra, W. E. (2018). Analisis pengaruh pengawasan fungsional, akuntabilitas publik dan peningkatan pelayanan publik terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(2), 181. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i2.143>
- Putri, R. R., & Subardjo, A. (2017). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran pada sektor publik. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 6(12), 1–19.
- Rahayu, N. L. S., Sulindawati, N. L. G. E., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.23887/jimat.v2i1.3401>
- Ridha, A. (2017). Partisipasi penyusunan anggaran pada satuan kerja perangkat Aceh rumah sakit umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 8(2), 1–15.
- Rigian, D., & Sari, R. P. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 1(1), 38–47. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i1.11>
- Safitri, D. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 8(3), 1–22.
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan nilai transparansi, akuntabilitas

- dan konsep value for money dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28.
- Setia, M. S., Halim, A., & S, S. W. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada pemerintah kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1), 1–10.
- Setiyanningrum, I., & Isroah. (2017). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money pada badan usaha milik daerah (BUMD) di Yogyakarta. *Jurnal Profita*, 1–20.
- Suartini, S., Sulistiyo, H., & Huda, S. (2020). Determinasi transparansi APBDes pada kabupaten Karawang. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7, 71–81.
- Tandililing, J. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah terhadap motivasi mengajar guru di kabupaten Keerom. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 4(2), 38–57.
- Triseptya, G. N., Pagulung, G., & Indrijawati, A. (2017). Pengaruh partisipasi anggaran, komitmen dan budaya organisasi terhadap kinerja manajerial dengan gaya kepemimpinan sebagai moderasi. *Journal of Management & Business*, 1(1), 34–45.
- Turalaki, S., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. N. (2013). Pengaruh akuntabilitas dan tranparansi publik terhadap kinerja pelayanan di dinas pendapatan kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1182–1192.